

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KORAN TEMPO	12	2-8-2002

Pemerintah Tolak Menunda Penyerahan Blok Coastal Plain

JAKARTA — Pemerintah menolak permintaan Pemerintah Provinsi Riau agar penyerahan dan penandatanganan kontrak bagi hasil Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) pada 8 Agustus ditunda. Badan Pelaksana akan tetap menandatangani kontrak bagi hasil baru dengan PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina pekan depan.

"Pengalihan dan penandatanganan kontrak bagi hasil antara Badan Pelaksana dan PT Bumi Siak Pusako tetap dilakukan pada 8 Agustus 2002," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro setelah menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR kemarin.

Dia menambahkan, apabila hal itu ditunda, akan tercipta preseden buruk. "Tidak hanya dari segi hukum, tapi juga biaya yang akan ditimbulkan."

Purnomo mengatakan hal itu ketika diminta konfirmasi soal permintaan Riau. Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Saleh Djasit pada 22 Juli, Riau meminta pemerintah menunda pengalihan Blok CPP dan penandatanganan kontrak bagi hasil antara Badan Pelaksana dan PT Bumi Siak Pusako. Diungkapkan di surat itu alasan penundaan, yaitu pembagian saham kepada empat kabupaten dan provinsi yang hingga kini belum selesai.

Menteri Energi menilai masalah pembagian saham antara kabupaten dan provinsi merupakan masalah bisnis dan harus diselesaikan sesuai prinsip bisnis yang berlaku. Untuk itu, dia meminta semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengalihan dan penandatanganan kontrak baru CPP bisa membedakan antara kepentingan bisnis dan hukum.

Menurut Kepala Badan Pelaksana Rachmat Sudibjo, per-

panjangkan kontrak baru Blok CPP akan tetap dilakukan meski para calon pengelola belum menyelesaikan pembagian saham. "Jadi, perpanjangan kontrak itu misinya tetap mempertahankan tingkat produksi minimal 50 ribu barel per hari," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, seperti dikatakan *Senior Vice President* PT Caltex Pacific Indonesia Wahyudin Yudiana Ardiwinata, Caltex telah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan CPP pada 8 Agustus.

Caltex, menurut Yudiana, semula mengajukan permohonan perpanjangan pengelolaan CPP selama dua tahun. Tapi pemerintah hanya meluluskan setahun saja.

Kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* Caltex atas Blok CPP berakhir pada Agustus 2001. Namun, dengan alasan belum siapnya Riau mengenai badan usaha yang akan dibentuk, pemerintah pusat memutuskan perpanjangan kontrak dengan Caltex selama setahun hingga Agustus 2002.

Dalam kontrak bagi hasil disebutkan bagian pemerintah 85 persen dan kontraktor 15 persen. Bagian kontraktor yang 15 persen itu yang akan dikelola bersama oleh Pertamina dan pemerintah Riau dengan bagian masing-masing 50 persen. Pemerintah Riau telah membentuk PT Bumi Siak Pusako sebagai perusahaan milik daerah yang akan mengelola CPP bersama Pertamina.

Hingga kini, bagian daerah yang 50 persen itu yang masih menjadi masalah, karena Kabupaten Siak menuntut pembagian lebih besar, yakni 70 persen (dari 50 persen), dalam konsorsium yang akan dibentuk, karena CPP berada di wilayahnya.

● ali nur yasin